

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
2022**

KATA PENGANTAR

Atas berkah rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Alhamdulillah Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 berhasil kami susun. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2023, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 masih mengacu kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Semoga Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Banjarnegara, 22 Juli 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANJARNEGARA



R. RIONO RAHADI PRASETYO, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19640217 198607 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas komunikasi dan Informatika	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas komunikasi dan Informatika	29
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	42
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas komunikasi dan Informatika	44
3.3. Program dan Kegiatan	46
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
4.1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	58

.....	
4.2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	59
4.3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	59
BAB V : PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Renja Dinas Komunikasi dan Informatika) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Komunikasi dan Informatika, yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan RKPD.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan

Rancangan Akhir RKPD, pelaksanaan forum Dinas Komunikasi dan Informatika/lintas Dinas Komunikasi dan Informatika, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan RKPD, penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi terkait. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

2 | Rencana Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara Tahun 2023

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
28. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 27).
29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 64)

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2023 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2023 dan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan

- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2023;
 - c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, serta sistematika dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dan review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, serta program dan kegiatan tahun 2023.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi urusan Komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 terdiri dari 5 program, 10 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.491.036.100,-, dengan fokus utama pada Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta penyiaran melalui transformasi digital (*uraikan prioritas daerah tahun 2021 yang didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika*). Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi :

1. Belum optimalnya website yang dikelola OPD
2. Belum optimalnya PPID di OPD
3. Pengembangan program SATU DATA belum optimal
4. Infrastruktur persandian belum optimal

Dari 5 program, 10 kegiatan, dan 25 sub kegiatan yang dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 5 program, 10 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 8.296.486.000,-

Pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi 5 program, 10 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 7.931.286.000,- Pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2021 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2021, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik dan Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Refocusing anggaran mengakibatkan pengelolaan media komunikasi publik melalui KIM dan FK METRA tidak terlaksana
2. Kurang optimalnya pengelolaan PPID

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi , sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Aplikasi Informatika Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan informatika dengan pihak-pihak terkait baik di daerah, provinsi maupun pusat terkait regulasi yang ada.
2. Sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pendampingan Dinas Komunikasi dan informatika terkait kegiatan penyebaran informasi yang dilaksanakan.
3. Kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan yang mendukung kegiatan di

bidang pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas layanan public.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka (*jelaskan implikasi dari poin di atas*). Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Kerja sama dengan pihak terkait (Organisasi/lembaga TIK lain di luar Pemda);
3. Dukungan Anggaran guna pengembangan E-Government di masing-masing OPD;
4. Penguatan kembali PPID;
5. Mengupayakan kembali aktifnya media komunikasi masyarakat melalui KIM dan FK METRA;
6. Mengupayakan adanya kegiatan untuk peningkatan kapasitas bagi SDM pengelola sandi dan telekomunikasi.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika
s.d. Tahun 2022* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Komunik asi dan Informati ka) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Dinas Komunik asi dan Informati ka tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika s/d tahun 2022	
					Target Renja Dinas Komuni kasi dan Informa tika tahun 2021	Realisasi Renja Dinas Komunik asi dan Informati ka tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak									

	Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
2.16	Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika											
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.16.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen, untuk 5 tahun			

2.16.01.2.02.03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah jasa administrasi pengelolaan keuangan OPD yang terpenuhi		10 orang	9 orang	100%	8 orang	10 orang	100%
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah peralatan kebersihan, bahan pembersih dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	-	3 paket	100%	100%	3 paket	100%, 3 paket	-
2.16.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah bahan logistik kantor		100%	100%	100%	12 paket	100%, 12 paket	100%

		yang terpenuhi										
2.16. 01.2. 06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan</i>	Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia			100%	100%	100%	276 eksemplar	100%, 276 eksemplar			
2.16. 01.2. 08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Prosentase terpenuhi ya jasa penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%			100%
2.16. 01.2. 08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah jasa peralatan dan perlengkap an kantor yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%
2.16. 01.2. 08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah PTT dan THL pada Kominfo yang disediakan pembayara n honoranya	100%		100%	100%	100%	9 orang	100%, 9 orang			100%

2.16. 02.2. 01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
2.16. 02.2. 01.02	<i>Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</i>							100%	100%	100%	12 bulan	100 %, 12 bulan	
2.16. 02.2. 01.04	<i>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>							5 jenis	4 jenis	100%	2 jenis	5 jenis untuk 5 tahun	
2.16. 02.2. 01.05	<i>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>							3 jenis	1 jenis	33%	1 jenis	3 jenis	

2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen PPID yang disusun	9 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	67 %	3 dokumen	13 dokumen, selama 5 tahun	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka layanan media massa	2 kegiatan selama 3 tahun	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan selama 5 tahun	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kegiatan hubungan masyarakat yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan, selama 5 tahun	
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah SIM yang mendukung pelayanan public	44 SIM	21 SIM	47 SIM	100%	49 SIM	49 SIM	100%
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah								

2.16.03.2.01.03	Daerah Kabupaten/Kota <i>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	Penyediaan konektivitas internet jaringan e-Government			100%	100%	100%	44 OPD	100%, 44 OPD untuk 5 tahun	100%
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah									
2.16.03.2.02.01	Kabupaten/Kota Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah menara telekomunikasi yang dapat dimonitoring dan diawasi	181 menara	195 menara	195 menara	100%	195 menara	195 menara untuk 5 tahun	100%	
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen SPBE yang disusun	3 aplikasi	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	3 aplikasi, 1 dokumen	100%	

2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah lisensi software yang diperpanjan g	4 software	4 software	100%	4 software	4 software untuk 5 tahun	100%
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dipelihara dan dikembangkan jaringan infrastrukturnya	131 titik	131 titik	100%	131 titik	131 titik, 44 OPD	100%
2.20	Statistik							
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase tersedianya data statistik sektoral	100%	100%	100%	100%	100%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Dinas komunikasi dan Informatika mengampu 6 (enam) Indikator. Dari 6 indikator tersebut, 5 berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Kesiapan aplikasi dan data dukungnya untuk bisa diintegrasikan mengakibatkan masih sedikitnya aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi.
2. Keterbatasan akun zoom meeting yang kapasitasnya maksimal hanya 100 peserta dan hanya memiliki satu akun, jadi ketika ada permintaan untuk melayani lebih dari 100 peserta tidak dapat difasilitasi.
3. Keterbatasan jumlah infrastruktur dan peralatan yang perlu adanya penambahan, baik fasilitas publik, kecamatan dan kelurahan yang belum terhubung.
4. Peralatan Infrastruktur radio yang rusak dan tidak memenuhi standar.
5. Banyaknya akun media sosial dan layanan aduan masyarakat yang harus dikelola, sedangkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten sangat terbatas.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Mengupayakan penyesuaian data-data pendukung aplikasi agar siap untuk diintegrasikan.
2. Aplikasi zoom apabila lebih dari 100 peserta, peserta yang lain agar mengikuti secara streaming melalui media soisal, namun tidak dapat berinteraksi dengan peserta yang lain.
3. Memaksimalkan infrastruktur yang dimiliki oleh pihak ketiga.
4. Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan yang rusak.
5. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang sudah ada.

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/St andar Nasiona 1	IKK LPPD	Target Renstra Dinas komunikasi dan Informatika				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		IKK LPPD	100	100	100	100	100	100	100	100		
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		IKK LPPD	28	28	30	32	6,82	8,51	10	15		
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten		IKK LPPD	20	40	60	80	63,25	81,67	83	85		
4	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun		IKK LPPD	100	100	100	100	100	100	100	100		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 3 urusan, yaitu Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2023 mencakup ketiga urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi dan peningkatan pelayanan Dinkominfo kepada OPD
2. Belum optimal pelaksanaan dan pengembangan e-government dalam rangka menunjang pelayanan publik dan pencapaian Indeks SPBE sesuai standard nasional.
3. Belum optimalnya pelaksanaan persandian dan penyediaan data statistik untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Banjarnegara

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Terhambatnya pemenuhan kebutuhan data dan informasi
2. Masih rendahnya Nilai Indeks SPBE yang berdampak pada Indeks Reformasi Birokrasi
3. Tingkat keamanan informasi belum terukur

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan

kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. Perkembangan teknologi informasi yang mengharuskan pelayanan publik secara online mengakibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika selalu meningkatkan kualitas pelayanan di bidang teknologi informasi.
2. Kemudahan masyarakat membuka akses informasi melalui medsos menuntut Dinas Komunikasi dan informatika untuk memberikan informasi yang benar dan dibutuhkan masyarakat.
3. Kebutuhan data dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan memerlukan terbangunnya system/aplikasi data yang terintegrasi.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2023 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi melalui implementasi SPBE
2. Membangun Satu Data Indonesia Daerah
3. Meningkatkan keamanan informasi dan aplikasi
4. Meningkatkan pelayanan pengelolaan pengaduan dan informasi

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 meliputi:

1. Penguatan pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan TIK
2. Penguatan keterbukaan informasi publik
3. Penguatan ketersediaan data sektoral
4. Penguatan persandian dan keamanan informasi

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
2	16	01			Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika				8.511.452.958				
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.601.452.958				
2	16	01	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000				
2	16	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen		10.000.000	Dinkominfo	APBD		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	7 Dokumen		5.000.000	Dinkominfo	APBD		

2	16	01	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			130.500.000				
2	16	01	06	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 meja kerja, 3 lemari arsip	44.500.0000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	06	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 AC, 4 laptop, 2 PC, 4 printer	86.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			268.202.293			
2	16	01	06	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	66.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	202.202.293	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			125.000.000			

2	16	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	80.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	20.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit AC, 12 laptop, 8 printer, 1 genset	25.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			1.210.000.000			
2	16	02	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.210.000.000			

2	16	02	01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 dokumen (pengelolaan website banjarnearak ab, layanan pengaduan)	25.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	02	01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen (baliho sosialisasi kemasyarakatan, kalender, Derap Serayu)	285.000.000	Kab. Banjarnegara	APBD	
2	16	02	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen (pengelolaan RSPD, penggantian peralatan radio yang rusak)	275.000.000	Kab. Banjarnegara	APBD	
2	16	02	01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 dokumen (PPID, KIM, FK METRA)	40.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	02	01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	6 layanan	285.000.000	Dinkominfo	APBD	

2	16	02	01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	160 orang	75.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	02	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			75.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	02	01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8 unit (Camera SLR, Clip on Mic, camcorder, Proyektor, Four camera driver unit, LCD monitor, PC unit khusus, HDD eksternal 2 TB)	150.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			2.700.000.000			
2	16	03	01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.321.210.000			

2	16	03	01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	44 OPD	1.321.210.000	Kab. Banjarnegar	APBD	
2	16	03	02		Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.378.790.000			
2	16	03	02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	195 dokumen	10.100.000	Kab. Banjarnegar	APBD	
2	16	03	02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 dokumen (arsitektur layanan dan infrastruktur SPBE, Implementasi SPBE)	326.840.000	Dinkominfo	APBD	

2	16	03	02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	47 unit aplikasi	421.000.000	Kab. Banjarnegar	APBD	
2	16	03	02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	3 dokumen (manage data centre, pemeliharaan jaringan, fasilitas vidcon)	620.850.000	Kab. Banjarnegar	APBD	
2	20				Statistik			128.920.000			
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			128.920.000			
2	20	02	01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	44 dokumen	128.920.000	Dinkominfo	APBD	
2	20	02	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	60.000.000	Dinkominfo	APBD	

2	20	02	01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	44 Orang	10.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	20	02	01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	44 Dokumen	8.920.000	Dinkominfo	APBD	
2	20	02	01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Paket	50.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	21				Persandian			148.763.900			
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			148.763.900			
2	21	02	01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			148.763.900			

2	21	02	01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	15.000.000	Kab. Banjarnegara	APBD	
2	21	02	01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	113.763.900	Kab. Banjarnegara	APBD	
2	21	02	01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	44 OPD	20.000.000	Kab. Banjarnegara	APBD	
								8.789.136.858			

Berdasarkan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Masih perlunya pengembangan Satu Data Indonesia Banjarnegara agar diperoleh hasil data yang valid dan akurat, dapat dibagi pakaikan ke pemerintah pusat dan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan.
2.
3.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
1.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	RAPI Banjarn egara	Terpenuhi nya Sarana dan Prasarana RAPI	Rp 12.000. 000,-	
		Kab. Banjarn egara	Tersampaik annya informasi program pembangun an pemerintah daerah melalui radio	Rp 25.000. 000,-	
2.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Banjarn egara	Terlaksana nya pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Rp 14.000. 000,-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017-2022, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan dalam Rencana Kerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan good governance.
2. Meningkatkan Pendayagunaan e-Government menuju Banjarnegara Smart City.
3. Meningkatkan pengelolaan informasi dan pelayanan komunikasi di lingkungan OPD Pemerintah Kab. Banjarnegara.

4. Meningkatkan penyediaan data statistik dan pelaksanaan persandian untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.
 - a. Meningkatkan jumlah dan kualitas data yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dan dapat dibagi pakaikan ke Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung pembangunan daerah;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan system komunikasi dan Informatika berbasis teknologi informasi modern;
 - c. Terlaksananya keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk menunjang peningkatan pelayanan publik yang baik dan proporsional.

Untuk sasaran yang akan dicapai dalam memberikan fokus penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan dalam bentuk kuantitatif sehingga sasaran Renja berdasarkan Renstra yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan public dan akuntabilitas Dinas komunikasi dan Informatika.
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatnya deseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik.
4. Meningkatnya Ketersediaan data statistik untuk menunjang kinerja pembangunan daeah.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan persandian :
 - a. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur dan masyarakat dibidang kominfo serta terjalin kerjasama informasi dengan media massa;

- b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi untuk kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang;
- c. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur Komunikasi dan Informatika.

3.3 Program dan Kegiatan

REKAPITULASI USULAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

OPD: Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Sumber Dana	Catatan Penting/Analisis Kebutuhan	Prakiraan Maj Tahun 2024
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)			
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2					Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
2	16	01			Bidang Usuran Komunikasi dan Informatika							8.511.452.958			9.231.348.198
2	16	01			Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							4.601.452.958			4.965.138.198
2	16	01	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							15.000.000			
2	16	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dinkominfo		7 dokumen	Renja, RKT, RKA, DPA, RTP SPIP, KAK, PK	10.000.000	APBD	7 dokumen perencanaan (Renja, RKT, RKA, DPA, RTP SPIP, KAK, PK)	25.000.000
															15.000.000

2	16	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinkominfo	7 Dokumen	5.000.000	APBD	7 dokumen pelaporan kinerja (LKPJ, LPPD, LKIP, Laporan Keuangan semester I, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Pengukuran Kinerja, POK)	10.000.000
2	16	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.827.750.665			4.023.638.198
2	16	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkominfo	40 orang	3.717.750.665	APBD		3.903.638.198
2	16	01	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinkominfo	160 dokumen	110.000.000	APBD	160 dokumen SPP dan SPJ (honor pengelola keuangan)	120.000.000
2	16	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dinkominfo		235.000.000			295.000.000

2	16	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Dinkominfo		3 paket	10.000.000	APBD	3 paket (peralatan kebersihan dan bahan pembersih, perlengkapan kantor)	15.000.000
2	15	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinkominfo		12 paket	200.000.000	APBD		250.000.000
2	16	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dinkominfo		276 eks/dokumen	25.000.000	APBD	276 eks/dokumen (surat kabar untuk guntingan pers, diasing di alun2)	30.000.000
2	16	01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dinkominfo			130.500.000			130.500.000
2	16	01	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinkominfo		10 meja kerja, 3 lemari arsip	44.500.000		Meja kursi CPNS baru	44.500.000
2	16	01	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinkominfo		2 AC, 4 laptop, 2 PC, 4 printer	86.000.000		Ada tambahan 10 CPNS sehingga sarpras masih kurang	86.000.000
2	16	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					268.202.293			316.000.000

2	16	01	06	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinkominfo	12 laporan	66.000.000	APBD	66.000.000
2	16	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinkominfo	13 laporan	202.202.293	APBD	250.000.000
2	16	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				125.000.000		175.000.000
2	16	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinkominfo	4 unit	80.000.000	APBD	125.000.000
2	16	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Dinkominfo	1 unit	20.000.000	APBD	25.000.000

2	16	01	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi		Dinkominfo				25.000.000	APBD		25.000.000
2	16	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik							1.210.000.000			1.815.000.000
2	16	02	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1.210.000.000			1.815.000.000
2	16	02	01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Banjarnegara				25.000.000	APBD		40.000.000
2	16	02	01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Banjarnegara				285.000.000	APBD		400.000.000

2	16	02	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Banjarnegara	12 dokumen (pengelolaan RSPD, penggantian peralatan radio yang rusak)	275.000.000	APBD	500.000.000
2	16	02	01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Banjarnegara	3 dokumen (PPID, KIM, FK METRA)	40.000.000	APBD	75.000.000
2	16	02	01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kab. Banjarnegara	6 layanan	285.000.000	APBD	400.000.000
2	16	02	01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Banjarnegara	160 orang	75.000.000	APBD	150.000.000
2	16	02	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Kab. Banjarnegara		75.000.000	APBD	100.000.000

2	16	02	01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinkominfo	8 unit (Camera SLR, Clip on Mic, camcorder, Proyektor, Four camera driver unit, LCD monitor, PC unit khusus, HDD eksternal 2 TB)	150.000.000	Kebutuhan peralatan liputan kegiatan pembangunan/perme rintahan	150.000.000
2	16	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				2.700.000.000		1.451.210.000
2	16	03	01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.321.210.000		1.321.210.000
2	16	03	01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Banjarnegara	12 sistem	1.321.210.000	sewa bandwidth APBD	1.321.210.000
2	16	03	02		Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.378.790.000		1.130.000.000

2	16	03	02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banjarnegara	195 dokumen	10.100.000	APBD	Monitoring dan pengendalian kinerja telekomunikasi	15.000.000
2	16	03	02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinkominfo	2 dokumen	326.840.000	APBD	2 dokumen (arsitektur layanan dan infrastruktur SPBE, Implementasi SPBE)	15.000.000
2	16	03	02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Dinkominfo	47 unit aplikasi	421.000.000	APBD	47 unit aplikasi	450.000.000

2	16	03	02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	Kab. Banjarnegara	3 dokumen	620.850.000	APBD	3 dokumen (manage data centre, pemeliharaan jaringan, fasilitas vidcon)	650.000.000
2	20				Statistik				128.920.000			183.920.000
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				128.920.000			183.920.000
2	16	02	01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				128.920.000			183.920.000
2	16	02	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Banjarnegara	4 dokumen	60.000.000	APBD	44 dokumen	75.000.000
2	16	02	01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik	Kab. Banjarnegara	44 Orang	10.000.000			25.000.000

2	16	02	01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab. Banjarnegara	44 Dokumen	8.920.000			8.920.000
2	16	02	01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Kab. Banjarnegara	1 Paket	50.000.000			75.000.000
2	21				Persandian				148.763.900			170.000.000
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi				148.763.900			170.000.000
2	21	02	01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				148.763.900			170.000.000
2	21	02	01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinkominfo	1 laporan	15.000.000	1 laporan		20.000.000

2	21	02	01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bebasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah n Daerah Kabupaten/ Kota Bebasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Banjarnegar a	1 laporan	113.763.900	APBD	1 laporan	120.000.000
2	21	02	01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunaka n Layanan Keamanan Informas	Kab. Banjarnegar a	44 OPD	20.000.000		44 OPD	30.000.000
					JUMLAH				8.789.136.858			9.585.268.198

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan program prioritas dalam Renstra 2017-2022. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Rencana program, kegiatan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun 2022 pada Urusan Komunikasi dan Informatika terdiri dari 3 program, 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

a. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program informasi dan komunikasi publik terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 6 sub kegiatan yaitu Monitoring Opini dan Aspirasi Publik; Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik; Pengelolaan Media Komunikasi Publik; Pelayanan Informasi Publik; Layanan Hubungan Media; Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

b. Program Aplikasi Informatika

Program aplikasi informatika terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan 5 sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah; Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program penyelenggaraan statistik sektoral terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya menjadi platform operasional bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2023. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi acuan bagi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk

berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 22 Juli 2022



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

R. RONO RAHADI PRASETYO, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19640217 198607 1 001